

## Implementasi PSAK Pasal 65 dan Peraturan Pajak di Indonesia Pada Laporan Keuangan Konsolidasi yang Terdaftar di BEI

Septiana Putri Pangestu<sup>1</sup>, Lisna Miranda<sup>2</sup>, Melinda Dyah Astuti<sup>3</sup>,  
Endang Kartini Panggiarti<sup>4</sup>

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

***Abstract** Consolidated report is an important report for companies that purchase or merge from other companies. The purpose of this study is to provide an overview of how the implementation of PSAK 65 and tax regulations in Indonesia on the consolidated financial statements listed on the IDX. The research method used in this research is literature review of articles or previous research. The data used in this study are secondary data from articles obtained from the Google Scholar database and consolidated financial statements published on the IDX. Based on the results of the analysis, it is known that every company that acquires another company has issued consolidated financial statements and implemented PSAK 65 and the existing tax regulations in Indonesia.*

***Keywords:** Consolidated Statements, PSAK 65, and Tax Regulations*

**Abstrak** Laporan konsolidasi menjadi laporan penting bagi perusahaan yang melakukan pembelian maupun merger dari perusahaan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi dari PSAK 65 dan peraturan pajak di Indonesia pada laporan keuangan konsolidasi yang terdaftar di BEI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review* dari artikel atau penelitian sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari artikel yang di dapat dari database *Google Scholar* serta laporan keuangan konsolidasi yang dipublikasikan di BEI. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa setiap perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasi dan mengimplementasikan PSAK 65 dan Peraturan Pajak yang ada di Indonesia.

**Kata kunci:** Laporan Konsolidasi, PSAK 65, dan Peraturan Pajak

### LATAR BELAKANG

Pada zaman sekarang merger terhadap perusahaan lain terus berkembang. Perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka. Adanya merger akan membuat peluang bagi perusahaan tersebut untuk memiliki nilai yang lebih dan profit yang optimal. Akuisisi yang dilakukan perusahaan besar, membuat perusahaan wajib menerbitkan laporan keuangan konsolidasi.

Bagi kalangan ekonomi, laporan keuangan menjadi sesuatu hal yang penting. Hal tersebut karena laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Akuisisi menurut Melindhar dan Aisjah (2015) merupakan pengambilalihan kepemilikan dan pengendalian atas saham atau asset perusahaan oleh perusahaan lain. Hal tersebut dapat diartikan bahwa akuisisi menjadikan perusahaan lain bagian dari perusahaan tersebut. Putri (2023) menyatakan beberapa perusahaan yang melakukan akuisisi yaitu:

1. PT XL Axiata mengakuisisi PT Link Net
2. Grup Medo mengakuisisi ConocoPhilip
3. Blibli mengakuisisi Pengelola Ranch Market
4. Google mengakuisisi Android
5. Disney mengakuisisi Pixar/Marvel

Adanya akuisisi mewajibkan perusahaan untuk menyajikan gabungan posisi keuangan (termasuk arus kas) dari suatu induk dan anak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan mengakuisisi tandanya akan ada pencatatan tertentu untuk laporan keuangan. Pencatatan laporan tersebut dinamakan laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi menurut IAI pada PSAK No.4 merupakan laporan keuangan suatu grup perusahaan yang dijadikan satu kesatuan ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perusahaan yang melakukan akuisisi harus membuat laporan konsolidasi.

Khadijah dan Purba (2021) menyatakan manfaat laporan konsolidasi untuk mengetahui efek anak perusahaan terhadap perusahaan induk dalam jangka waktu Panjang. Adanya manfaat tersebut akan membuat perusahaan menjadi terlihat baik di mata *stakeholders*. Manfaat tersebut diantaranya:

1. Untuk mengetahui efek anak perusahaan terhadap perusahaan induk dalam jangka waktu panjang.
2. Memberikan informasi terkini untuk perusahaan induk mengenai kinerja anak perusahaan.

Berdasarkan manfaat tersebut, setiap pemangku kepentingan nantinya dapat memahami laporan keuangan baik perusahaan induk dan juga dari perusahaan anak. Saat ini setiap perusahaan di Indonesia yang sudah mengakuisisi juga membuat laporan konsolidasi.

PSAK 65 merupakan sebuah peraturan yang membahas mengenai laporan konsolidasi. Menurut Baker et al. (2015) menyatakan bahwa induk perusahaan harus mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi. PSAK 65 dalam akuntansi merupakan pasal yang penting dan juga perlu dipahami oleh mereka yang bekerja dalam bidang keuangan.

Laporan konsolidasi yang dibuat harus sesuai dengan PSAK 65. Hal tersebut karena PSAK 65 telah mengatur mengenai laporan konsolidasi. Peraturan lain yang dapat mempengaruhi dari laporan keuangan konsolidasi yaitu peraturan pajak di Indonesia. Peraturan pajak di Indonesia dapat mempengaruhi laporan konsolidasi. Peraturan pajak di Indonesia sangat memiliki banyak keterkaitan dengan laporan keuangan. Setiap keuangan yang berada di pemerintahan maupun non pemerintahan akan terpengaruh terhadap pajak. Hal tersebut tentunya akan membuat setiap perusahaan terfokus pada laporan keuangan yang bisa dipengaruhi pajak.

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari PSAK 65 dan peraturan pajak di Indonesia terhadap laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi yang harus dilakukan oleh perusahaan yang melakukan akuisisi agar dapat

memberikan gambaran kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan mengenai laporan keuangan yang dimilikinya. Hal itu akan mempermudah dalam transparansi laporan keuangan yang dilakukan perusahaan.

## **KAJIAN TEORI**

### **LAPORAN KONSOLIDASI**

Laporan konsolidasi merupakan laporan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang telah melakukan akuisisi terhadap perusahaan atau anak perusahaan. Laporan konsolidasi menurut IAI PSAK 4 laporan konsolidasi merupakan laporan keuangan suatu grup perusahaan yang disajikan satu kesatuan ekonomi. Berdasarkan IAI tersebut laporan konsolidasi merupakan laporan yang mengabungkan laporan keuangan perusahaan induk dan juga perusahaan anak sehingga menjadi satu kesatuan laporan keuangan. Kesimpulan dari hal tersebut laporan keuangan konsolidasi harus terpenuhi oleh perusahaan yang melakukan konsolidasi baik untuk akuisisi perusahaan lain maupun memiliki perusahaan anak.

### **PSAK 65**

PSAK 65 merupakan sebuah peraturan yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Dalam PSAK 65 laporan konsolidasi merupakan laporan keuangan yang harus disiapkan oleh induk Perusahaan (Baker et al., 2015). Hal tersebut karena dengan menerapkan laporan keuangan konsolidasi, maka perusahaan membuktikan telah mengakuisisi sebuah perusahaan lain atau anak perusahaan.

### **Peraturan Pajak**

Pajak merupakan kewajiban yang harus di taat oleh setiap warga negara. Pajak menurut Mardiasmo (2016) merupakan iuran yang dibayarkan rakyat kepada negara yang akan masuk kedalam kas negara yang melaksanakan Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Berdasarkan pengertian dari Mardiasmo (2016) maka setiap perusahaan diwajibkan untuk membayarkan pajak yang telah ditetapkan. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi dari laporan keuangan konsolidasi yang akan dilakukan.

## **METODE**

Metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2015) merupakan data yang berbentuk data, skema, dan gambar. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan menggunakan metode *literatur review*. *Literature review* merupakan uraian penelitian yang terdiri dari teori, bukti, dan bahan referensi lain yang menjadi dasar kegiatan penelitian. Penulis akan melihat

dari penelitian sebelumnya dan mencari sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan.

Metode ini dipilih karena merupakan metode yang sesuai dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini akan melihat penelitian-penelitian lainnya dan juga mengambil kesimpulan dari fenomena-fenomena maupun peristiwa-peristiwa yang ada sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian implemtasi PSAK 65 dan Peraturan Pajak pada laporan keuangan konsolidasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **IMPLEMENTASI PSAK 65 DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI**

Laporan keuangan konsolidasi menjadi sesuatu hal yang penting bagi perusahaan grup. Mereka yang telah membuat akuisisi perusahaan harus dapat membuat laporan keuangan konsolidasi. PSAK 65 merupakan salah satu peraturan yang harus diperhatikan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Hal tersebut karena pada pasal tersebut memiliki banyak keterkaitan dengan laporan keuangan konsolidasi.

Perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki lebih banyak laporan keuangan konsolidasi. Hal tersebut karena perusahaan - perusahaan tersebut dapat dibaca oleh umum dan biasanya bukan hanya perusahaan yang biasa-biasa saja melainkan perusahaan yang sudah terkenal didalam publik.

Laporan konsolidasi yang terikat pada PSAK 65 harus dapat memenuhi prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan paragraf 1. Laporan konsolidasi juga harus memenuhi syarat yang ada. Syarat-syarat laporan konsolidasi menurut Rohma dan Afendi (2023), syarat yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan konsolidasi yaitu:

1. Prosedur konsolidasi
2. Kebijakan akuntansi yang sama
3. Pengukuran
4. Hak suara potensial
5. Tanggal pelaporan

Prosedur laporan keuangan konsolidasi harus sesuai dengan PSAK 65, agar laporan tersebut dapat memenuhi standar akuntansi yang diinginkan. Menurut artikel yang ditulis Pratiwi et al. (2023) prosedur laporan keuangan konsoliasi sebagai berikut:

1. Penghapusan transaksi internal
2. Penyusunan nilai wajar

### 3. Konsolidasi proposional

Prosedur-prosedur tersebut harus dapat dipenuhi oleh perusahaan, agar perusahaan tersebut dapat membuat laporan keuangan konsolidasi dengan benar sesuai standar yang ada pada PSAK 65.

Penelitian ini memiliki sampel pada perusahaan yang terdaftar di BEI untuk dilihat laporan keuangan konsolidasi sudah sesuai dengan PSAK 65 atau belum. Sampel BEI tersebut akan diambil di laman [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yang jumlah sampel yang peneliti ambil sebanyak 10 sampel pada tahun 2022 sebagai berikut:

NO	PERUSAHAAN	KODE
1.	Astra Internasional Tbk	ASII
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	BBRI
3.	Pan Brothers Tbk	PBRX
4.	PT Lotte Chemical Titan Tbk	FPNI
5.	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA
6.	PT Lavender Bina Cendikia Tbk	BMBL
7.	Ciputra Development Tbk	CTRA
8.	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	PGEO
9.	Lippo General Insurance Tbk	LPGI
10.	PT Sinar Mas Multiartha Tbk	SMMA

Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terdaftar di BEI. Perusahaan yang telah *go public* tentunya akan membuat laporan keuangan yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian perusahaan-perusahaan tersebut yaitu:

1. Astra Internasional: memiliki hasil yaitu sudah memasukkan entitas anak pada laporan keuangan tahunan yang dilakukan. Hal tersebut berarti laporan keuangan tahunan tersebut sudah melakukan konsolidasi.
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: memiliki hasil yaitu sudah sesuai melakukan laporan konsolidasi. Hal tersebut terbukti dari hasil laporan keuangan tahunan yang sudah memasukkan laporan entitas anak perusahaan yang dimiliki.
3. Pan Brothers Tbk: memiliki hasil yaitu sudah memasukkan laporan entitas anak pada laporan keuangannya. Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan laporan keuangan konsolidasi.

4. PT Lavender Bina Cendikia Tbk: memiliki laporan keuangan yang sudah memasukkan entitas anak pada perusahaan. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan tersebut telah melakukan laporan konsolidasi.
5. Ciputra Developmen Tbk: memiliki hasil perusahaan tersebut telah memasukkan entitas anak atau induk pada laporan keuangan yang berarti bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan laporan keuangan konsolidasi.
6. Lippo General Insurance Tbk: memiliki hasil yaitu perusahaan tersebut telah memasukkan entitas induk maupun anak. Hal tersebut berarti perusahaan tersebut telah melakukan laporan keuangan konsolidasi.
7. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk: memiliki hasil yaitu perusahaan tersebut telah melakukan laporan keuangan konsolidasi. Hal tersebut berarti perusahaan tersebut telah menambahkan entitas anak atau induk dalam laporannya.
8. PT Sinar Mas Multiartha Tbk: memiliki hasil yaitu pada laporan keuangan tahunan yang dimiliki perusahaan tersebut telah memasukkan laporan keuangan entitas induk atau anak. Hal tersebut berarti pada perusahaan tersebut telah melakukan laporan keuangan konsolidasi.
9. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk: memiliki hasil yaitu pada laporan keuangan tahunan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut telah memasukkan laporan entitas anak atau induk. Hal tersebut berarti laporan perusahaan tersebut telah memiliki laporan keuangan konsolidasi.
10. PT Lotte Chemical Titan Tbk; memiliki hasil yaitu perusahaan tersebut telah melakukan laporan keuangan konsolidasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya laporan entitas anak atau induk pada perusahaan yang berarti perusahaan telah melakukan laporan keuangan konsolidasi.

Hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI telah mengimplemtasi PSAK 65, hal tersebut terbukti dari laporan keuangan yang ada. Laporan keuangan yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi dengan memasukkan laporan entitas induk atau anak pada laporan tahunan perusahaan.

## **IMPLEMENTASI PERATURAN PAJAK DI INDONESIA PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI**

Laporan keuangan konsolidasi juga dipengaruhi oleh peraturan pajak yang ada di Indonesia. Pajak di Indonesia merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pajak dalam perusahaan akan mempengaruhi laporan keuangan. Penelitian yang kami lakukan, akan mengambil laporan keuangan perusahaan yang terdapat di BEI yang bersumber pada *website* [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yang memiliki sampel 10 perusahaan.

Pada penelitian ini memiliki hasil perusahaan-perusahaan yang telah *go public* dalam BEI telah mencantumkan pengaruh pajak. Pajak dalam laporan keuangan akan dihitung sehingga perusahaan tau harus membayar berapa pajak perusahaan kepada pemerintah.

Peraturan pajak yang ada dalam laporan keuangan, menurut Direktur Jenderal Pajak (2017) dalam yang berjudul “Peraturan Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2017” yaitu:

- Pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK 03/2016 tentang jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimoan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara. Terdapat beberapa pasal yang ada yaitu:

1. Pasal 1

Pada pasal 1 memiliki arti yaitu bahwa Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa laporan Per Negara yang selanjutnya disebut laporan per negara yang disampaikan setiap tahun oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan dan pelaksanaa perjanjian internasional dibidang perpajakan.

2. Pasal 2

Memiliki pembahasan mengenai entitas induk baik yang langsung maupun tidak langsung.

3. Pasal 3:

Memiliki kesimpulan bahwa entitas induk merupakan objek luar negeri yang memiliki konstitusi dalam grup usaha muntinasional.

4. Pasal 4

Pada pasal 4 memiliki kesimpulan wajib pajak badan merupakan entitas konstituen atau memiliki transaksi transaksi afiliasi harus menyampaikan notifikasi ke Direktorat Jenderal Pajak pada ayat (1)

5. Pasal 5

Pada ayat 1 memiliki kesimpulan identifikasi wajib pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dan kewajiban penyampaian laporan per negara.

6. Pasal 6

Pada ayat 1 yang ada pada pasal 2 ayat 1 berdasarkan data dan informasi tersedia sampai akhir tahun pajak entitas induk yang merupakan subjek luar negara.

7. Pasal 7

Pada pasal 1 Direktur Jenderal Pajak melakukan pertukaran laporan per negara secara otomatis dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra yang melakukan QCAA.

8. Pasal 8

Pada pasal 3 ayat 4 pada laman Direktorat Jenderal Pajak setiap tahun terjadi perusahaan daftar negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

9. Pasal 9

Pada pasal 9 ini mengenai kewajiban penyampaian laporan per negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ditentukan berdasarkan tahun pajak entitas induk mulai tahun pajak 2016.

10. Pasal 10

Pada pasal 10 ini membahas mengenai peraturan direkur jenderal ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan.

Hasil dari penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa entitas induk akan memiliki pengaruh dari pajak. Pajak yang ada pada entitas induk sebagai subjek luar negeri. Hal tersebut berarti apabila perusahaan memiliki anak perusahaan yang berada di luar negeri atau induk perusahaan berada diluar negeri maka perusahaan tersebut dalam membuat laporan keuangan konsolidasi harus menerapkan pajak yang ditentukan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian tersebut memiliki kesimpulan yaitu setiap laporan keuangan konsolidasi akan mengimplementasi dari PSAK 65 dan Peraturan Pajak yang ada di Indonesia. Hal tersebut terbukti pada penelitian yang dilakukan pada 10 perusahaan yang terdaftar di BEI. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan laporan konsolidasi dan juga menghitung pajak pada hasil kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang telah terbuka untuk umum. Hal

tersebut membuat masyarakat atau pemangku kepentingan dapat melihat laporan keuangan konsolidasi yang telah memenuhi standar PSAK 65 dan Peraturan Pajak di Indonesia.

## SARAN

Saran yang dapat peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Perusahaan harus memperhatikan laporan keuangan konsolidasi terutama bagi perusahaan yang mengakuisisi anak perusahaan atau perusahaan lain.
2. Perusahaan juga harus memperhatikan PSAK 65 dalam membuat laporan keuangan konsolidasi.
3. Perusahaan juga harus memperhatikan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia dalam membuat laporan keuangan konsolidasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Pratiwi, N., Pramudya Wardana, R., Maharani, S., Kartini Panggiarti, E., Tidar Jalan Kapten Suparman, U., Utara, M., & Tengah, J. (2023). Penerapan PSAK Nomor 65, PSAK Nomor 22, dan PSAK Nomor 4 Pada Laporan Keuangan Konsolidasi. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 232–241. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i3.633>
- Baker, R. E., Christensen, T. E., Cottrel, D. M., Rais, I. K., Astono, W., & Wulandari, R. E. (2015). *Akuntansi Keuangan Lanjutan* (D. Mandasari, Ed.; Edisi 2). Salemba Empat.
- Direktur Jenderal Pajak. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara*. Ortax.Org.
- Khadijah, & Purba, A. M. (2021). *Akuntansi Perbankan*. CV Batam Publisher.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (16th ed.). CV Andi Offset.
- Melindhar, S., & Aisjah, S. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Pada Perusahaan Go Public yang Terdaftar di BEI (Periode Tahun 2009-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Rohma, M., & Afendi, D. (2023). Implementasi PSAK 65 Pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Indonesia Tbk dan Entitas Anak. *JUMBA: Jurnal Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2(1).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.